

ANALISIS SUMBER – SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BLITAR

Alfian Miftaqul Hanafi ^a, Wahyu Hidayat Riyanto ^b, Hendra Kusuma ^c

^{abc}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

* Corresponding author: alfianmiftaqul88@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 18 September 2020

Revised 20 December 2020

Accepted 13 January 2021

Available online 15 February 2021

Keywords: PAD, contribution, effectiveness

JEL Classification: B26, O18

Abstract

This research aims to find out how much the contribution and how effective the sources of Local Indigenous Income are to the Local Indigenous Income (PAD) of Blitar City. With the type of data used is secondary data obtained from the Office of Financial Management Revenue and Regional Assets of Blitar City and quantitative analysis tools in the form of calculation of the contribution of PAD sources, the ratio of effectiveness from PAD sources to PAD to know the financial independence of the region. The result is that the sources of Local Indigenous Income that contribute the most to PAD receipts are local taxes, while the lowest are the results of segregated management. When viewed from the effectiveness of PAD based on the calculation results obtained that the effectiveness of The Original Income of Blitar City Area is very effective with a value of 109.49%. As for the receipt of pad resources to know the financial independence of Blitar City area is still lacking with the average yield value – averaged over the last five years of 17.54%.

PENDAHULUAN

Melalui otonomi daerah pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah dengan menggali potensi yang dimiliki dalam rangka upaya terselenggaranya otonomi daerah untuk meningkatkan keuangan sendiri berupa upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui peningkatan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan cara menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2004). Pemerintah daerah dalam hal ini bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembaran peran dan fungsi DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002).

Pencapaian pendapatan asli daerah dilihat dari struktur penerimaan daerah, PAD terdapat beberapa aspek yang berpotensi yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain PAD yang sah (Widjaja, 2014). Hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah mendominasi dalam pembiayaan daerah, hal ini dikarenakan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah merupakan aspek yang berpotensi dan berperan penting dalam kehidupan suatu daerah, khususnya dalam pembangunan serta dalam pembiayaan daerah (Zuraida, 2012).

Perkembangan di Kota Blitar menunjukkan perubahan secara signifikan yang cukup pesat dalam pembangunan daerah melalui fasilitas – fasilitas yang disediakan pemerintah, tentunya pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan dari sumber pendapatan yang dikembangkan dalam upaya pembiayaan pembangunan. Namun yang menjadi permasalahan masih banyak

potensi yang dimiliki Kota Blitar yang belum dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah mengingat banyaknya potensi yang ada. Adanya potensi pariwisata tersebut sudah selayaknya memberikan kontribusi pada sumber – sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kota Blitar. Dari peningkatan dan pembangunan fasilitas yang memadai tentunya berpengaruh pada peningkatan wisatawan baik wisatawan lokal maupun manca Negara untuk berkunjung ke Kota Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Elim & Ersita, 2016) meneliti mengenai penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Memperoleh hasil penelitian tingkat efektifitas untuk retribusi daerah tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif atau kurang dari 100% dengan rata – rata sebesar 86,708%. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh (Lakoy et al., 2016) dengan menggunakan analisis kontribusi dan regresi sederhana, memperoleh hasil yang menunjukkan kontribusi dari retribusi daerah masuk pada kriteria sedang bagi pendapatan asli daerah. (Yuliasuti & Dewi, Luh, 2017) menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode deskriptif. Memperoleh hasil rata-rata efektifitas Retribusi Kota Denpasar sebesar 119,02%, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah dikategorikan sangat kurang dengan presentase sebesar 7,39%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2017) meneliti mengenai retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Memperoleh hasil rata – rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan menunjukkan pemungutannya sudah berjalan secara efektif dengan presentase sebesar 105,30%. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Lamongan menunjukkan rata – rata sebesar 1,85%. Dan (Murniati & Kasasih, 2017) meneliti mengenai kontribusi dan efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Memperoleh hasil efektifitas pelayanan pasar dinyatakan efektif dan dengan kriteria kontribusi kurang.

Berdasarkan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat diartikan sebagai hasil dari pungutan daerah yang berasal dari sumber – sumber penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembiayaan otonomi daerah dengan menggali menggali potensi sumber yang ada. PAD sendiri memiliki sumber – sumber PAD yang terbagi menjadi empat, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. (Mardiasmo, 2002). Upaya peningkatan PAD berhubungan dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave perkembangan pembangunan pemerintah terkait pada investasi pemerintah dengan swasta dalam penyediaan prasarana berupa pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. (Mangkoesebroto, 2001).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Halim, 2004). Pemungutan pajak yang harus

berlandaskan undang – undang ini berarti pemunggut pajak telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR atau dikenal dengan asas yudiris. Dengan demikian pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas atas hak dalam memunggut pajak (B. Ilyas & Burton, 2014).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai satu sumber pendapatan sedangkan penelitian ini meneliti tentang keseluruhan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD mengenai kontribusi dan efektifitas kemudian meneliti ttentnag kemandirian keuangan daerah melalui PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan seberapa efektif sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar. Dari peritungan kontribusi dan efektifitas, nantinya untuk mengetahui seberapa besar PAD berperan pada kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan sumbangan pemerintah pusat. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan alat analisis kuantitatif, untuk mengetahui besarnya kontribusi dan efektifitas dari sumber - sumber PAD terhadap besarnya PAD. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan daerah Kota Blitar dari pengelolaan PAD yang ada selama tahun anggaran 2015 sampai 2019. Dengan persamaan perhitungan sebagai berikut:

Kontribusi

- $$\text{Kotribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

- $$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

- $$\begin{aligned} &\text{Kontribusi hasil pengelolaan yang dipisahkan} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan hasil pegelolaan yang dipisahkan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (3) \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} &\text{Kontribusi Lain – lain PAD yang sah} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan lain–lain PAD yang sah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (4) \end{aligned}$$

Tabel 1 Kriteria Kontribusi Sumber – sumber PAD

Presentase	Kriteria
00.00% - 10%	Sangat Kurang
10.00% - 20%	Kurang
20.00% - 30%	Sedang
30.00% - 40%	Cukup Baik
40.00% - 50%	Baik
<50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 dalam (Murniati & Kasasih, 2017)

Efektivitas

- Efektivitas Pajak = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$ (5)
- Efektivitas Retribusi = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$ (6)
- Efektivitas hasil pengelolaan yang dipisahkan = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan hasil pegelolaan yang dipisahkan}}{\text{Target Penerimaan hasil pengelolaan yang dipisahkan}} \times 100\%$ (7)
- Efektivitas Lain – Lain PAD yang sah = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang sah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang sah}} \times 100\%$ (8)
- Efektivitas PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$ (9)

Tabel 2 Kriteria Efektifitas Sumber – sumber PAD

Presentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
>60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Muniarti & kaksih: 2017)

Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

..... (1)

0)

Tabel 3 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
00.00% - 10%	Sangat Kurang
10.00% - 20%	Kurang
20.00% - 30%	Sedang
30.00% - 40%	Cukup
40.00% - 50%	Baik
<50%	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi

Kontribusi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi diketahui dengan membandingkan penerimaan sumber – sumber PAD dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2010).

Tabel 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Dalam (%)	Kriteria
2015	23.992.972.051,66	120.885.637.871,52	19,85%	Kurang
2016	25.959.707.141,99	132.924.257.091,93	19,53%	Kurang
2017	38.800.888.323,70	176.282.859.561,33	22,01%	Sedang
2018	40.551.989.785,42	163.038.476.392,31	24,87%	Sedang
2019	44.674.770.697,03	166.228.456.518,83	26,88%	Sedang
	Rata – rata		22,63%	Sedang

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 5 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Dalam (%)	Kriteria
2015	8.728.370.068,50	120.885.637.871,52	7,22%	Sangat Kurang
2016	9.110.839.927,00	132.924.257.091,93	6,85%	Sangat Kurang
2017	7.189.205.708,00	176.282.859.561,33	4,08%	Sangat Kurang
2018	9.998.687.576,00	163.038.476.392,31	6,13%	Sangat Kurang
2019	10.142.362.905,50	166.228.456.518,83	6,10%	Sangat Kurang
	Rata – rata		6,08%	Sangat Kurang

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 6 Kontribusi Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar

Tahun	Realisasi Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Dalam (%)	Kriteria
2015	985.410.769,74	120.885.637.871,52	0,82%	Sangat Kurang
2016	1.023.333.373,00	132.924.257.091,93	0,77%	Sangat Kurang
2017	1.053.268.431,76	176.282.859.561,33	0,60%	Sangat Kurang
2018	1.104.657.721,40	163.038.476.392,31	0,68%	Sangat Kurang
2019	1.169.069.219,24	166.228.456.518,83	0,70%	Sangat Kurang
	Rata – rata		0,71%	Sangat Kurang

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 7 Kontribusi Lain – Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar

Tahun	Realisasi Lain – lain PAD yang sah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Dalam (%)	Kriteria
2015	87.178.884.981,62	120.885.637.871,52	72,12%	Sangat Baik
2016	96.830.376.649,94	132.924.257.091,93	72,85%	Sangat Baik
2017	129.239.497.097,87	176.282.859.561,33	73,31%	Sangat Baik
2018	111.383.141.309,49	163.038.476.392,31	68,32%	Sangat Baik
2019	110.242.253.697,06	166.228.456.518,83	66,32%	Sangat Baik
	Rata – rata		70,58%	Sangat Baik

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata – rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kategori kontribusi sedang. Selama kurun waktu 5 tahun pajak daerah Kota Blitar mengalami peningkatan secara terus menerus dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Tabel 5 menunjukkan bahwa rata – rata kontribusi retribusi daerah menunjukkan kriteria sangat kurang dengan presentase sebesar 6,08%. Tabel 6 menunjukkan bahwa rata – rata kontribusi hasil pengelolaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar masih sangat kurang dengan presentase kontribusi sebesar 0,71%. Tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan lain – lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar rata – ratanya sangat baik, dengan presentase 70,58%.

Dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan upaya secara efisien dan terus menerus untuk meningkatkan penerimaan sumber – sumber PAD yang ada nantinya dapat dikembangkan sesuai potensi yang ada. Dalam melihat penerimaan sumber - sumber PAD maka dilihat dengan cara perhitungan dan analisis untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Efektifitas

Analisis efektifitas merupakan perbandingan realisasi penerimaan sumber – sumber PAD terhadap target penerimaannya. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses pencapaiannya mencapai tujuan kebijakan (Mahmudi, 2010).

Tabel 8 Efektifitas Pajak Daerah Kota Blitar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Dalam %	Kriteria
2015	21.928.923.643,00	23.992.972.051,66	109,41%	Sangat Efektif
2016	24.685.433.982,00	25.959.707.141,99	105,16%	Sangat Efektif
2017	32.043.734.700,00	38.800.888.323,70	121,09%	Sangat Efektif
2018	35.848.612.510,00	40.551.989.785,42	113,12%	Sangat Efektif
2019	39.627.800.000,00	44.674.770.697,03	112,74%	Sangat Efektif
	Rata – rata		112,30%	Sangat Efektif

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 9 Efektifitas Retribusi Daerah Kota Blitar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas dalam %	Kriteria
2015	8.472.495.926,00	8.728.370.068,50	103,02%	Sangat Efektif
2016	9.157.436.870,00	9.110.839.927,00	99,49%	Efektif
2017	7.893.572.085,00	7.189.205.708,00	91,08%	Efektif
2018	9.195.822.115,00	9.998.687.576,00	108,73%	Sangat Efektif
2019	10.117.923.822,00	10.142.362.905,50	100,24%	Sangat Efektif
	Rata – rata		100,51%	Sangat Efektif

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 10 Efektifitas Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan Kota Blitar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Dalam %	Kriteria
2015	1.116.831.433,50	985.410.769,74	88,23%	Cukup Efektif
2016	1.023.333.373,00	1.023.333.373,00	100,00%	Efektif
2017	1.053.268.431,76	1.053.268.431,76	100,00%	Efektif
2018	1.104.657.721,40	1.104.657.721,40	100,00%	Efektif
2019	1.169.069.219,00	1.169.069.219,24	100,00%	Efektif
	Rata – rata		97,65%	Efektif

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 11 Efektifitas Lain – lain PAD Yang Sah Kota Blitar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Dalam %	Kriteria
2015	68.529.506.158,03	87.178.884.981,62	127,21%	Sangat Efektif
2016	85.260.139.075,00	96.830.376.649,94	113,57%	Sangat Efektif
2017	109.225.493.501,12	129.239.497.097,87	118,32%	Sangat Efektif
2018	109.333.838.105,65	111.383.141.309,49	101,87%	Sangat Efektif
2019	126.354.003.612,00	110.242.253.697,06	87,25%	Cukup Efektif
	Rata – rata		109,65%	Sangat Efektif

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 12 Efektifitas PAD Kota Blitar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Dalam %	Kriteria
2015	100.047.757.160,53	120.885.637.871,52	120,83	Sangat Efektif
2016	120.126.343.300,00	132.924.257.091,93	110,65	Sangat Efektif
2017	150.216.068.717,88	176.282.859.561,33	117,35	Sangat Efektif
2018	155.482.930.452,05	163.038.476.392,31	104,86	Sangat Efektif
2019	177.268.796.653,00	166.228.456.518,83	93,77	Efektif
	Rata – rata		109,49	Sangat Efektif

Sumber: (BPKAD, 2020)

Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah sudah sangat efektif karena tingkat efektifitas melebihi 100% dengan rata – rata tingkat efektifitas yang mencapai 112,30% . Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak daerah sangat baik. Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi daerah mayoritas sudah sangat efektif. Dengan rata – rata tingkat efektifitasnya sudah melebihi 100% atau sebesar 100,51%. Tabel 10 menunjukkan bahwa penerimaan hasil pengelolaan yang dipisahkan Kota Blitar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 efektifitas retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata – rata efektifitas 97,65% dengan ditunjukkan oleh kriteria efektif. Tabel 11 menunjukkan peningkatan target yang telah ditetapkan dengan kriteria rata – rata efektifitasnya sangat efektif dan ditunjukkan oleh perentase rata – rata melebihi 100% atau tercapai sebesar 109,65%. Tabel 12 menunjukkan efektifitas PAD Kota Blitar selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rata – rata efektifitas PAD Kota Blitar melebihi 100% atau sebesar 109,49%, rata – rata efektifitas PAD Kota Blitar termasuk Sangat Efektif.

Dari keempat sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar yang ada dengan rata – rata efektifitas masing – masing sumber PAD dari tahun ke tahun selalu memenuhi target dan tergolong sangat efektif, menunjukkan bahwa

kinerja pemerintah daerah Kota Blitar dalam pengelolaan PAD yang ada sangat baik dan target daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan apa yang telah di tetapkan bahkan melebihi apa yang telah di targetkan setiap tahunnya. Kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sudah cukup baik, peningkatan yang dilakukan selama lima tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola potensi yang ada, akan tetapi adanya target penerimaan yang belum tercapai menjadi masalah yang perlu dikaji lagi. Dalam upaya pengembangan dan peningkatan target tentunya tidak terlepas dari potensi yang ada, sehingga penerimaannya dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 13 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar

Tahun	Presentase	Kriteria
2015	15,70%	Kurang
2016	15,69%	Kurang
2017	20,72%	Sedang
2018	18,23%	Kurang
2019	17,37%	Kurang
Rata – Rata	17,54%	Kurang

Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar, diperoleh rata – rata kemandirian keuangan daerah dalam persen yang dapat dilihat pada tabel 4.23. Dari Tabel 4.23 menunjukkan hasil Kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diperoleh presentase rata – rata sebesar 17,54% dengan kriteria kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh peran PAD yang sangat kurang dalam penerimaan Pendapatan Daerah, selain itu otonomi daerah dalam penyusunan RAPBD belum didukung oleh kemandirian daerah. Tabel 4.23 tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah Kota Blitar masih bergantung tinggi pada bantuan pemerintah pusat.

Tabel 14 Rekomendasi Target Penerimaan PAD Kota Blitar Untuk Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah

Uraian	Target Penerimaan Tahun Terakhir	Nilai Kemandirian	Rekomendasi Target Penerimaan	Nilai Kemandirian
Pajak Daerah	44.674.770.697,03	4,67%	122.772.635.795,00	12,83%
Retribusi Daerah	10.142.362.905,50	1,06%	88.227.880.126,70	9,22%
Hasil Pengelolaan Yang Dipisahkan	1.169.069.219,24	0,12%	79.232.846.794,90	8,28%
Lain – Lain PAD Yang Sah	110.242.253.697,06	11,52%	188.321.548.904,00	19,68%
PAD	166.228.456.518,83	17,37%	478.459.219.776,00	50,01%
Pendapatan Daerah		956.918.439.552,00		

Untuk dapat mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah, perlunya adanya peningkatan nilai target PAD sesuai dengan potensi dari sumber – sumber yang ada. Dari rata – rata kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 17,54% dengan kriteria kurang untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah dengan kriteria baik dengan presentase 50%, maka perlu meningkatkan presentase nilai target PAD dengan menaikkan sumber – sumber PAD sesuai potensi yang ada. Hasil dari Tabel 14 dapat dijadikan rekomendasi dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Menunjukkan peningkatan dari masing – masing sumber PAD sebesar 12,83% untuk pajak daerah, 9,22% untuk retribusi daerah, 8,28% untuk hasil pengelolaan yang dipisahkan dan untuk lain – lain PAD yang sah sebesar 19,68%. Sehingga memperoleh presentase sebesar 50,01% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 50,01% tersebut maka kemandirian keuangan daerah Kota Blitar tergolong sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan kontribusi dari setiap sumber - sumber PAD yang ada dapat disimpulkan bahwa, rata – rata dari kontribusi pajak daerah sebesar 22,63% dengan kriteria sedang. Rata – rata dari kontribusi retribusi daerah sebesar 6,08% dengan kriteria sangat kurang. Rata – rata kontribusi hasil pengelolaan yang dipisahkan sebesar 0,71% dengan kriteria sangat kurang dan kontribusi dari lain – lain PAD yang sah sebesar 70,58% dengan kriteria sangat baik. Dari rata – rata yang ada dapat diketahui bahwa Pajak Daerah berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah di kota Blitar, meskipun dari rata – rata Lain – Lain PAD Yang Sah paling tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh lain – lain PAD yang sah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan efektifitas yang ada, tingkat efektifitas pajak daerah sudah sangat efektif, dengan rata – rata tingkat efektifitasnya sudah melebihi 100% yaitu sebesar 112,30%. Untuk tingkat efektifitas retribusi daerah sudah sangat efektif, dengan rata – rata efektifitasnya sudah melebihi 100% yaitu sebesar 100,51%. Untuk efektifitas hasil pengelolaan yang dipisahkan sudah efektif, dengan presentase rata – rata sebesar 97,65%. Untuk tingkat efektifitas lain – lain PAD yang sah sudah sangat efektif dengan rata – rata melebihi 100% atau sebesar 109, 65%. Dan untuk efektifitas dari PAD Kota Blitar presentasenya sudah melebihi 100% atau sebesar 109,49% dengan kriteria sangat efektif. Dari rata – rata efektifitas sumber - sumber PAD, Pajak Daerah merupakan yang paling efektif dibandingkan sumber PAD lainnya dengan presentase rata – rata sebesar 112,30%.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, W., & Burton, R. (2014). *Hukum Pajak* (Enam). Salemba Empat.
- BPKAD. (2020). *Laporan Penerimaan dan Target Pendapatan asli Daerah Blitar 2015 - 2019*.
- Elim, I., & Ersita, M. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis*

- Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi). UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik AKuntansi Keuangan Daerah* (Tiga). Salemba Empat.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. ., & Tumangkeng, Y. . S. (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 559–567.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Dua). UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Terbaru). Andi.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85–109.
- Widjaja, H. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers.
- Yuliasuti, I., & Dewi, Luh, N. (2017). Analisis ANALISI Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1 Februari 2017), 91–102. <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JUARA/article/view/650>
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika.